



**H. BAMBANG PUDJIONO, SH.
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH, MH.
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2014
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Muatan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

- A. Urusan Desentralisasi;
- B. Tugas Pembantuan; dan
- C. Tugas Umum Pemerintahan.

Penyusunan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2014, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan atau saran itu disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten yang memiliki wilayah terluas ke-2 se-Provinsi Jawa Tengah, dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Purwodadi. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2014 tercatat sebesar 1.412.325 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,68% atau bertambah 9.565 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2013.

Dari aspek Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 714 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.694 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Geyer yaitu sebesar 338 jiwa/km².

Dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 713.077 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 699.248 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 102%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan usia, rasio ketergantungan penduduk sebesar 41%, artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung 41 jiwa penduduk yang non produktif, angka ketergantungan sebesar 41% ini masuk dalam kategori **ketergantungan rendah**.

Adapun jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 17,86% pada tahun 2010, berurutan mengalami penurunan menjadi 17,38%, 16,13% dan pada akhir tahun 2013 sebesar 14,87%.

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan penduduk, tamatan SD sederajat menduduki peringkat yang tertinggi yaitu 45%, kemudian secara berurutan diikuti oleh tidak atau belum tamat SD sebanyak 27%, tamat SLTP atau sederajat 17%, tamat SLTA atau sederajat 9%, dan terakhir tamat Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 2%.

Selanjutnya dari Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Grobogan selama empat tahun terakhir masuk dalam kategori kelas pembangunan manusia menengah ke atas dan selalu mengalami kenaikan, mulai dari 70,83 pada tahun 2010 dan 72,37 pada akhir tahun 2013.

3. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami pertumbuhan, terakhir diperkirakan mencapai angka pertumbuhan 4,24%. Adapun untuk PDRB Perkapita kondisinya terus mengalami kenaikan. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.7.390.457,- atau naik sebesar 10,54% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada aspek pemerataan pendapatan, dapat dilihat melalui indikator Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang Dinikmati Oleh Kelompok 40% Penduduk yang Berpendapatan Terendah. Berdasarkan kedua indikator tersebut, pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan masih berada pada kategori **ketimpangan rendah**. Hal ini dilihat dari :

Pertama, bahwa indikator Gini Ratio akhir tahun 2013 sebesar 0,34. *Kedua*, bahwa berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah yang menikmati pendapatan total kabupaten pada tahun 2013 sebesar 21,38%, dan selalu di atas 17% selama lima tahun sebelumnya.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera"**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan konkret yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

B. PRIORITAS DAERAH

Sesuai visi misi tersebut, maka setiap tahun ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja dan pendanaannya.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2016), maka pembangunan Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua tahap pembangunan, yakni tahap kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik (2011-2013), dan tahap peningkatan perwujudan masyarakat Grobogan yang sejahtera lahir dan batin (2014-2016).

Berpedoman pada tahapan tersebut di atas, maka RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 termasuk dalam tahap pembangunan kedua (2014-2016), sehingga prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 adalah prioritas pembangunan tahap perwujudan masyarakat Grobogan yang sejahtera lahir dan batin. Pembangunan pada tahap kedua lebih menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat Grobogan dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014, prioritas pembangunan tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.
8. Peningkatan kesadaran hukum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas.

III. KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014, disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan secara teknis, penyusunan APBD didasarkan pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran APBD Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan prinsip Keadilan,

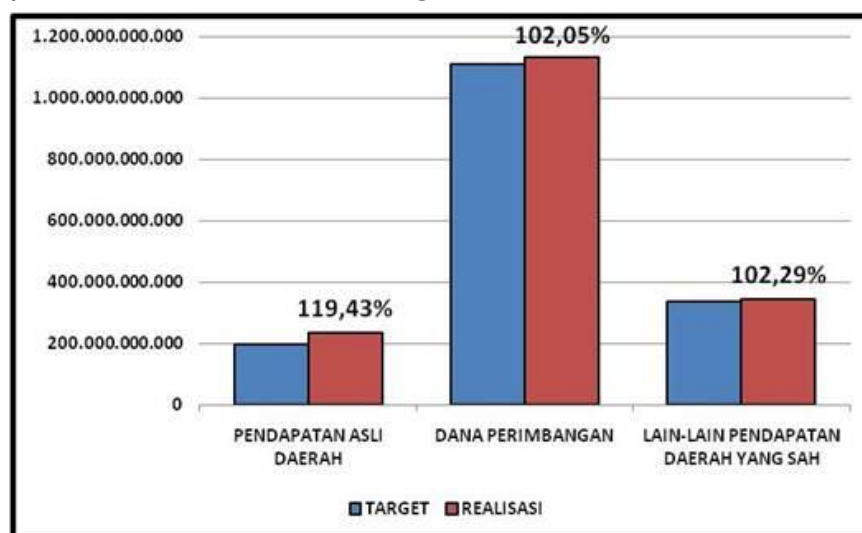
Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Selanjutnya, secara ringkas disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka realisasi APBD yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2014 sebesar Rp.1.642.386.125.000,- terealisasi Rp.1.711.056.213.805,- atau 104,18%, dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.197.093.376.000,- terealisasi Rp.235.385.114.692,- atau 119,43%, target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.108.079.641.000,- terealisasi Rp.1.130.745.214.336,- atau 102,05%, dan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.337.213.108.000,- terealisasi Rp.344.925.884.777,- atau 102,29%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



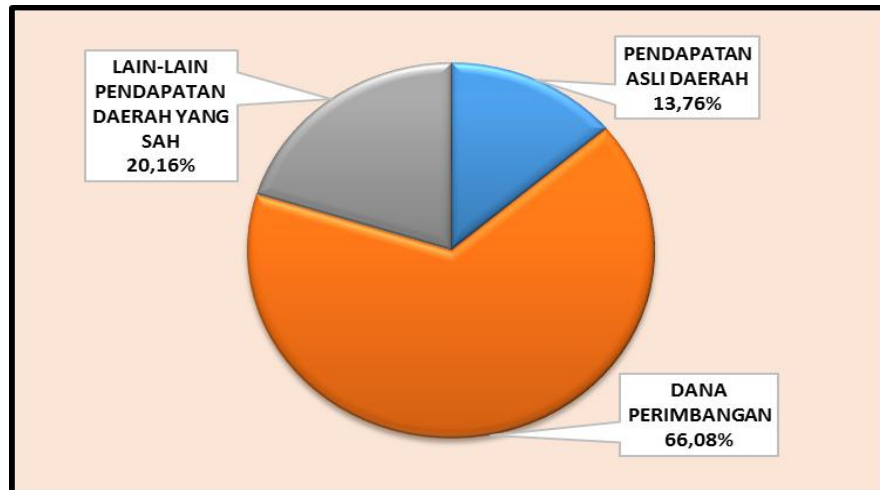
Gambar 1
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014
 Adapun secara rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2014

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN	1.642.386.125.000	1.711.056.213.805	104,18
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	197.093.376.000	235.385.114.692	119,43
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.314.678.000	45.528.787.888	110,20
2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.075.486.000	28.028.552.159	103,52
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.783.749.000	10.886.504.006	100,95
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.919.463.000	150.941.270.639	128,01
B	DANA PERIMBANGAN	1.108.079.641.000	1.130.745.214.336	102,05
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	44.565.439.000	67.231.012.336	150,86
2	Dana Alokasi Umum	977.675.512.000	977.675.512.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	85.838.690.000	85.838.690.000	100,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	337.213.108.000	344.925.884.777	102,29
1	Pendapatan Hibah	4.177.976.000	2.649.605.300	63,42
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.754.434.000	80.404.284.995	102,09
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221.326.331.000	221.326.331.000	100,00
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.954.367.000	40.545.663.482	123,04

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

Komposisi Sumbangan terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan sebesar 66,08% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 20,06% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,76%. Komposisi penyumbang pendapatan Daerah ini, lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

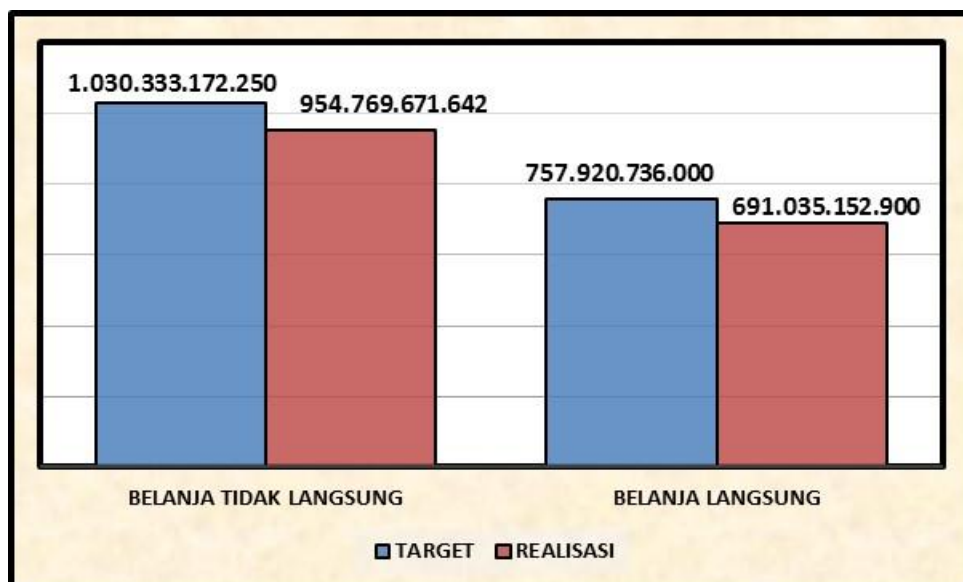


Gambar 2
Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2014

B. BELANJA DAERAH

Alokasi Belanja Kabupaten Grobogan tahun 2014 sebesar Rp.1.788.253.908.250,- terealisasi Rp.1.645.804.824.542,- atau 92,03%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.030.333.172.250,- terealisasi Rp.954.769.671.642,- atau 92,67% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.757.920.736.000,- terealisasi Rp.691.035.152.900,- atau 91,18%.

Serapan Belanja Daerah dimaksud dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 3
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2014

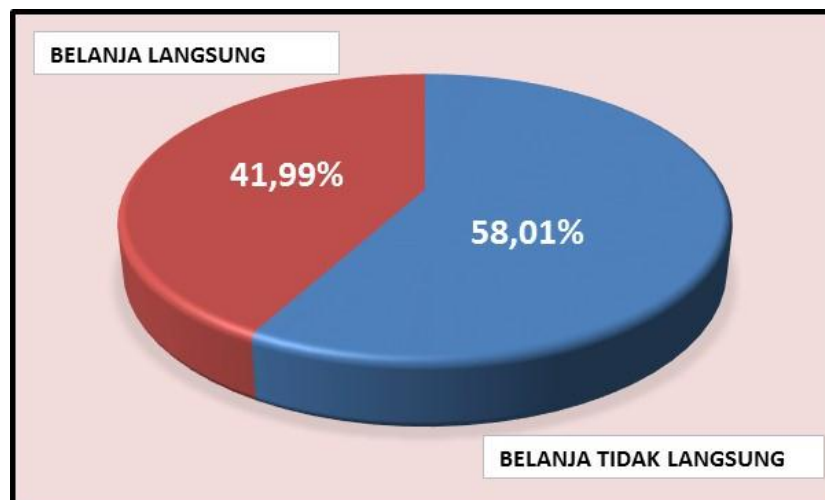
Adapun secara rinci target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	1.788.253.908.250	1.645.804.824.542	92,03
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.030.333.172.250	954.769.671.642	92,67
1	Belanja Pegawai	899.369.262.750	836.117.897.297	92,97
2	Belanja Bunga	47.205.000	24.948.302	52,85
3	Belanja Subsidi	428.500.000	428.500.000	100,00
4	Belanja Hibah	35.697.294.000	31.803.253.608	89,09
5	Belanja Bantuan Sosial	9.292.624.000	7.368.471.000	79,29
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	82.998.286.500	79.026.601.435	95,21
8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	-	-
B	BELANJA LANGSUNG	757.920.736.000	691.035.152.900	91,18
1	Belanja Pegawai	46.913.940.766	43.297.113.900	92,29
2	Belanja Barang dan Jasa	372.349.363.230	347.215.856.333	93,25
3	Belanja Modal	338.657.432.004	300.522.182.667	88,74

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

Sedangkan Komposisi serapan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 58,01% dan belanja langsung 41,99%, dapat disajikan dalam Gambar sebagai berikut :



Gambar 4
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2014

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 166.127.016.838,- atau 98,82% dari target penerimaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp. 21.682.895.600,- atau 97,51% dari target pengeluaran pembiayaan daerah.

Selanjutnya perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2014, terdapat Surplus sebesar Rp.65.251.389.263,- sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp. 144.444.121.238,- dengan demikian maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 209.695.510.501,-.

Realisasi pembiayaan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	PENDAPATAN	1.642.386.125.000	1.711.056.213.805	104,18
2	BELANJA	1.788.253.908.250	1.645.804.824.542	92,03
	Surplus/Defisit	(145.867.783.250)	65.251.389.263	(44,73)
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	168.104.939.250	166.127.016.838	98,82
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.237.156.000	21.682.895.600	97,51
	Pembiayaan Netto	145.867.783.250	144.444.121.238	99,02
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	209.695.510.501	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan pada tahun 2014, Kabupaten Grobogan melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dengan total anggaran sebesar Rp. 757.920.736.000,- dan terealisasi 91,18%.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2014, akan dipaparkan secara singkat sebagai berikut :

A. Penguatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal

Sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian, sarana dan prasarana jalan memegang peranan yang sangat penting. Pada tahun 2014, melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, telah dilaksanakan 312 paket peningkatan jalan sepanjang \pm 72,69 km, meliputi 47 paket Konstruksi paving block sepanjang 6,32 km, 211 paket Beton Full Rigid sepanjang 48,72 km, 5 paket Beton Setapak sepanjang 0,67 km, 2 paket Telford sepanjang 1,8 km, dan 47 paket ATB sepanjang 15,18 km. Selanjutnya Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, telah dilaksanakan antara lain 5 paket Telford sepanjang 1,07 km, 3 paket penataan trotoar sepanjang 0,69 km, serta 14 paket rehab jembatan total sepanjang 0,24 km.

Terkait dengan sarana dan prasarana jalan, dari seluruh jalan kabupaten sepanjang 890,01 km, jalan dengan kondisi baik/mantap mencapai 38,10% atau sepanjang 339,05 km, meningkat 57,46 km dibandingkan tahun lalu. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 8,88% atau 79,05 km. Jalan dengan kondisi rusak ringan sebesar 23,60% atau 210,04 km, berkurang 21,33 km dibandingkan tahun lalu. Sedangkan jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 29,42% atau 261,86 km, berkurang 20,06 km dibandingkan tahun lalu.

Selain sarana dan prasarana jalan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian juga dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini ditempuh melalui Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air di musim kemarau guna menunjang pertanian, antara lain : rehab saluran sekunder sepanjang 66,441 km, rehab saluran tersier sepanjang 500 m, pembuatan embung sebanyak 2 buah, pembangunan bendung sebanyak 7 buah, serta rehab bendung sebanyak 44 paket.

B. Peningkatan Ketrampilan dan Kewirausahaan

Usaha meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan diselenggarakan melalui beberapa program, diantaranya adalah: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra Industri Potensial, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Program-program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan pelatihan terhadap Industri Kecil dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta pameran dalam rangka promosi produk IKM dan UMKM baik pada tingkat lokal, provinsi maupun nasional.

C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk melaksanakan prioritas ini ditempuh melalui beberapa program diantaranya: Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan program lainnya.

Diantara program-program tersebut, program pelayanan terbaru yang ditempuh adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yaitu menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan simpul pelayanan bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu, prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik ini, mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan hasil terlaksananya Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu.

D. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Upaya meningkatkan pemerataan pembangunan ditempuh melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dengan hasil terlaksananya Karya Bhakti Mandiri TMMD di 11 desa, kegiatan TMMD Sengkuyung di 2 desa, serta pembinaan dalam rangka pelaksanaan ADD bidang Pemberdayaan Masyarakat di 273 desa.

Prioritas ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan hasil kegiatan berupa Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan pada 18 kecamatan.

E. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian derajat kesehatan selain yang telah disampaikan sebelumnya mengenai Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, dapat juga dilihat dari indikator kinerja kunci bidang kesehatan. Diantaranya adalah capaian kinerja Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100%, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meningkat 21,91% dibandingkan tahun lalu, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA meningkat 10,26% dibandingkan tahun lalu.

Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditempuh melalui beberapa program, diantaranya adalah : Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dan program lainnya.

Usaha tersebut mendapatkan dukungan dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam bentuk Tugas Pembantuan, dan ditunjang dengan belanja tidak langsung untuk Bantuan kepada PMI Cabang Grobogan dan Hibah kepada kelompok masyarakat bidang Kesehatan.

F. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kesetiakawanan Sosial

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban antar umat beragama dibutuhkan toleransi yang baik. Toleransi tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap saling pengertian dan menghargai, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan rukun dan penuh kedamaian tanpa diskriminasi.

Untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial tersebut, ditempuh melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan fokus kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Pembinaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia.

G. Peningkatan Program Pro Rakyat (Penanggulangan Kemiskinan) dan Program Keadilan Untuk Semua

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan terus kita perhatikan. Upaya ini ditempuh karena masih terdapat penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dari data yang ada, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, mulai tahun 2010, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, dari angka 17,68%, 17,38%, 16,13% dan pada akhir tahun 2013 sebesar 14,87%. Hal tersebut tentu menggembirakan, karena itu upaya tersebut harus terus dipertahankan sehingga angka kemiskinan akan terus mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan telah bersifat pro rakyat, artinya semua program dan kegiatan yang dilakukan telah bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kondisi tersebut ada beberapa program yang ditempuh, diantaranya : Program Pengentasan Kemiskinan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Di samping itu, untuk mendukung prioritas program pro rakyat, juga ditunjang dengan belanja tak langsung, antara lain berupa Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa, Belanja Bantuan PAMSIMAS, Bantuan Dana Daerah untuk Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, Bantuan Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin, Belanja Paket Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, serta Bantuan Sosial kepada Transmigran

H. Peningkatan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan manusia sebagai pelaku utamanya, karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk moral, mental dan intelektualitasnya perlu dikembangkan disamping sistem dan pranata perundangannya.

Karena itu untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut, ditempuh diantaranya melalui Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,

yang dilakukan melalui kegiatan pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, serta Sosialisasi mengenai Hak Asasi Manusia. Dan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, khususnya pelaksanaan Perda yang berhubungan dengan IMB, Ijin Gangguan (HO), pajak dan retribusi.

I. Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi dan Berpolitik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan setiap tahun melaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat. Program ini difokuskan pada beberapa kegiatan, diantaranya: Peningkatan Hubungan Lembaga Pemerintah dan Partai Politik, Kegiatan Cipta Kondisi Daerah Dalam Rangka Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Sosialisasi Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan pendidikan politik masyarakat untuk pemilih pemula.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, berdasarkan data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Grobogan Tahun 2014 sebesar 66,40%, atau 734.289 warga yang menggunakan hak pilihnya dari total 1.105.862 Daftar Pemilih Tetap. Bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, angka ini menurun 3,01%. Sedangkan untuk Pemilu Legislatif tingkat partisipasi masyarakat sebesar 71,65%, turun 0,28% dibandingkan Pemilu sebelumnya. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat menurun dibanding Pemilu sebelumnya, namun secara umum capaian kinerja partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kabupaten Grobogan tahun 2014 masuk dalam kategori berhasil menurut indikator yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2010-2014.

J. Perintisan dan Pengembangan Industri dan Perdagangan yang Terkait Dengan Pertanian Dalam Arti Luas

Kinerja prioritas pembangunan ini dapat dilihat dari indikator kinerja kunci, diantaranya adalah untuk bidang perikanan, produksi perikanan mencapai 2.425 ton, 67% lebih tinggi dari yang ditargetkan daerah. Hal ini

sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Grobogan sebesar 13,48 kg/kapita/tahun, 9% lebih tinggi dari yang ditargetkan daerah.

Di bidang pertanian, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai 5,172 Ton / Ha. Bidang perdagangan, nilai ekspor sebesar Rp. 1.552.000.000,-. Bidang industri, pertumbuhan jumlah industri sebesar 0,95%.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung prioritas ini, diantaranya : Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, serta Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari Pemerintah Pusat, melalui 6 (enam) Kementerian, yang meliputi: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kehutanan, dengan total anggaran sebesar Rp. 61.605.163.000,- dan terserap sebesar 97,14%, dengan perincian sebagai berikut :

- A. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan, dengan anggaran Rp. 5.237.345.000,- terealisasi 97,00%, untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan bagi 30 Puskesmas.
- B. Urusan Bersama dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan anggaran Rp. 7.152.500.000,- terealisasi 100%, digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan di 17 desa/kelurahan pada kecamatan Purwodadi, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di 19 desa pada 8 kecamatan, serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di 19 desa pada 12 kecamatan.
- C. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran Rp. 525.520.000,- terealisasi 99,91%, digunakan untuk Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- D. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran Rp. 33.171.648.000,- terealisasi 98,53%, digunakan untuk Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu, Fasilitas Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah, serta PNPM Mandiri Perdesaan pada 18 kecamatan.
- E. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp. 13.630.100.000,- terealisasi 91,86% digunakan untuk pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, serta Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.
- F. Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Kehutanan dengan anggaran Rp. 1.888.050.000,- terealisasi 99,69%, digunakan untuk Pembuatan bibit kehutanan sebanyak 800.000 batang pada 20 kelompok tani dan penanaman seluas 850 Ha.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2014, antara lain sebagai berikut :

- A. Kerja sama antar daerah, berupa kerja sama regional Kedungsepur yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Grobogan, Demak, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga, kerja sama penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengembalian Kewenangan Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Grobogan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pengelolaan Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
- B. Kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY,

PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, Universitas Muhammadiyah Semarang, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan lain-lain.


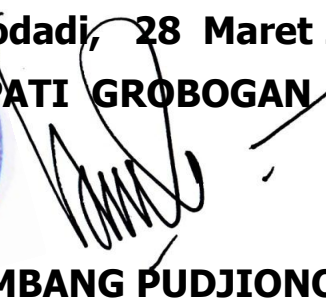
- C. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Instansi Vertikal, dalam rangka mencapai keterpaduan, keselarasan, kesamaan langkah dan keharmonisan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh antara lain melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Penegakan Peraturan Daerah.
- D. Terkait dengan pembinaan batas wilayah, sampai dengan tahun 2014, dari keseluruhan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan daerah lain, masih terdapat 3 batas yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri, meskipun semua tahapan telah dilaksanakan serta telah tercapai kesepakatan dengan daerah yang berbatasan, yaitu batas Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Pati, Kabupaten Blora dan Kabupaten Kudus. Untuk hal ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- E. Dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi pemetaan potensi bencana alam, penyediaan bahan bantuan bencana alam, melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, bantuan air bersih, pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir, rehabilitasi hutan dan lain-lain.
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan unsur masyarakat.
- G. Hal Lain-lain.
Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2014, sebagai berikut :
 1. Penghargaan Nasional Transmigration Award Tahun 2014 kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Asal Transmigrasi;
 2. Sertifikat Adipura untuk kategori Kota Kecil;

3. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2014 kategori Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan untuk SMP 5 Purwodadi;
4. Juara I Tingkat Nasional Lomba Kelompok Tani Kedelai An. Kelompok Tani "Berkah Tani" Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon;
5. Juara I dan III Tingkat Nasional Lomba Situs Web Antar SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
6. Serta beberapa prestasi tingkat regional lainnya.

VII. PENUTUP

Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah, serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan baik dan kondusif.

Selanjutnya saya menyadari, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena saya kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridloi usaha kita semua. Amin.

 **Purwodadi, 28 Maret 2015**
BUPATI GROBOGAN

H. BAMBANG PUDJIONO, SH